

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun semakin marak praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan pelaku aparat pemerintah. Praktek KKN tersebut dapat berbentuk penyalahgunaan kekuasaan, suap-menyuap, pemberian uang pelicin atau sogokan, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara semata-mata untuk kepentingan pribadi. Praktek KKN telah menjadi perhatian di penjuru Indonesia dan dianggap sebagai hal yang wajar di negara ini. Masyarakat Indonesia sudah tidak heran lagi dengan adanya KKN, namun dibalik itu masyarakat tetap menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Oleh karena itu, diperlukan fungsi pengawasan dan pengendalian internal yang baik atas pelaksanaan pemerintahan serta pengelolaan keuangan negara sehingga tercapai tujuan yang efektif dan efisien.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan hukum kenegaraan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang independen, yakni bebas

dari pengaruh pihak yang diaudit. Sebagai pengemban tugas fungsional di pemeriksaan, auditor pelaksana BPK ditantang untuk dapat memberikan hasil pemeriksaan yang mampu mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dari setiap kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah termasuk aparat pengawas (auditor) intern pemerintah, para manajemen di perusahaan-perusahaan milik negara, rumah sakit pemerintah, kontraktor, konsultan bahkan siapa saja yang dapat merugikan keuangan negara. Inilah esensi dari jabatan auditor fungsional dari seorang auditor, yang melekat sepanjang karir pekerjaannya dan berhubungan langsung dengan upaya meminimalkan risiko penyimpangan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Landasan-landasan yuridis produk terbaru era reformasi seperti UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara semakin memperluas dan memperkuat kewenangan dan fungsi BPK. Kalau sebelumnya objek pemeriksaan lebih ditekankan pada pemeriksaan kewajaran laporan keuangan oleh pemerintah, saat ini BPK dapat memeriksa seluruh objek pemeriksaan dari pusat sampai kedaerah yaitu Pemerintah Daerah dan BUMD. Tidak hanya pada sisi pengelolaan keuangan, tapi juga kinerja dan audit investigasi dalam rangka lebih mengakomodasi laporan-laporan masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, BPK perlu didukung oleh kinerja auditornya. Larkin dalam Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa terdapat

empat dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, antara lain: kemampuan (ability), komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Auditor yang mempunyai kemampuan auditing akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan.

Salah satu bentuk peningkatan terhadap mutu SDM terutama auditor yang dimiliki tertuang dalam Rencana Strategis BPK yaitu meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen. Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas (Keputusan BPK No.3/K/I-XII.2/5/2011).

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007).

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam

SPAP, auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Suatu profesi, apapun itu di dalamnya pasti terkandung etika yang memuat komitmen moral tinggi, dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan tersebut merupakan arahan dalam menjalankan suatu profesi, disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas (Arumsari, 2014). Setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kinerja BPK yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. Auditor hendaknya memperhatikan prinsip dasar good governance dalam BPK tersebut agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Pemahaman good governance diimplementasikan pada perusahaan secara tepat, terutama untuk memperoleh karakter perusahaan yang kuat dalam menghasilkan manajemen kinerja yang unggul (Trisnarningsih, 2007).

Budaya merupakan konsep penting untuk memahami masyarakat dan kelompok manusia dalam jangka waktu yang panjang, termasuk dalam sebuah

organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik dari suatu budaya organisasi, bukan dengan apakah para karyawan menyukai budaya atau tidak. Menurut Robbins (2003) pengertian budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi.

Gaya kepemimpinan (leadership style) juga dapat mempengaruhi kinerja. Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Menurut Alberto et al. Dalam Wati (2010) menyatakan kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja. Temuan ini memberi gambaran bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya.

Kinerja auditor BPK sendiri perlu dimonitoring oleh publik dan publik berhak melakukan hal tersebut. Masyarakat memberikan amanat pada BPK untuk melakukan pengawasan terhadap unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Peran auditor BPK adalah sebagai pihak ketiga independen yang menengahi kepentingan pemerintah dan publik. Namun faktanya, publik terkadang belum mengerti

bagaimana kinerja auditor di BPK itu sendiri karena belum tersedianya wadah untuk monitoring kinerja auditor pemerintah.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Elya Wati dkk. tahun 2010 serta penelitian Adelia Lukyta Arumsari tahun 2014. Penelitian ini menggunakan 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. 5 variabel independen tersebut adalah independensi, etika profesi, pemahaman *good governance*, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan dimana variabel independensi, etika profesi, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian Adelia Lukyta Arumsari, sedangkan variabel pemahaman *good governance* adalah variabel yang digunakan dalam penelitian Elya Wati. 1 variabel dependen yang digunakan adalah kinerja auditor pemerintah, seperti dalam penelitian Elya Wati.

Peneliti menggunakan 4 variabel independen pertama sebagai karakteristik dasar auditor kemudian ditambah dengan 1 variabel independen yang terakhir agar lebih menunjang karakter seorang auditor. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah teori yang melandasi penelitian serta sampel penelitian.

B. Batasan Masalah Penelitian

Suatu penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terlalu jauh haruslah ditentukan pembatasan masalah penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain variabel yang diteliti sebagai

karakteristik auditor adalah independensi, etika profesi, dan pemahaman *good governance*. Variabel budaya organisasi dan gaya kepemimpinan merupakan faktor dari luar diri auditor yang juga diteliti guna mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja auditor pemerintah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?
2. Apakah etika profesi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?
4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?

5. Apakah pemahaman *good governance* auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
4. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
5. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh independensi auditor, etika profesi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Akuntansi, khususnya Audit.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Pemerintah
Pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan BPK ketika sedang dilakukan kegiatan audit, sehingga kinerja auditor BPK lebih baik dan dapat memberikan laporan audit yang berkualitas. Adanya laporan audit yang berkualitas juga dapat memberikan tanggapan publik yang baik terkait kinerja aparat pemerintah itu sendiri.
 - b. Bagi BPK Perwakilan D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah
Penelitian ini sebagai masukan bagi pimpinan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka menjaga amanat publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

evaluasi bagi para auditor di wilayah BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan audit.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dari sisi keuangan dan kinerja pengawas keuangan pemerintah. Kemudian kedepannya diharapkan masyarakat lebih mendukung kinerja pengawas keuangan pemerintah (BPK) agar tidak timbul salah paham antara masyarakat dan pemerintah tentang penggunaan uang rakyat.